



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 28 JULI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

Subandi Tutup Perseka Muda Cup XX Piala Bupati

WARU-Turnamen Sepak Bola Perseka Muda Cup XX Piala Bupati Sidoarjo 2026 resmi berakhir. Partai final yang berlangsung di Lapangan Perseka Muda, Desa Kepuhkiran, Kecamatan Waru, Minggu (26/7) sore, berlangsung meriah dan dipadati penonton.

Penutupan turnamen yang telah bergulir selama sebulan itu menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pembinaan sepak bola sekaligus mencetak bibit-bibit atlet berbakat.

Bupati Sidoarjo Subandi hadir langsung menutup turnamen yang telah menjadi agenda tahunan tersebut. Menurutnya, kompetisi sepak bola di tingkat daerah memiliki banyak manfaat, mulai dari mempererat kebersamaan masyarakat hingga menjadi wadah pembinaan atlet.

"Turnamen seperti ini memiliki banyak nilai positif. Selain mempererat kebersamaan masyarakat, juga menjadi motivasi bagi para pemain untuk terus



MERIAH: Bupati Sidoarjo Subandi menyerahkan trofi dan hadiah kepada Jakun FC dari Desa Putal, Kecamatan Tanggulangin, usai menjadi juara Perseka Muda Cup XX Piala Bupati Sidoarjo 2026.

meningkatkan prestasi," ujar Subandi.

Ia menilai kompetisi sepak bola selalu mendapat antusiasme tinggi dari ma-

syarakat. Karena itu, penyelenggaraan turnamen seperti Perseka Muda Cup diharapkan terus digelar secara berkelanjutan di

berbagai wilayah Sidoarjo. Menurutnya, semakin banyak kompetisi yang digelar, semakin besar pula peluang lahirnya

pemain-pemain muda berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah di level yang lebih tinggi. (dik/vga)

Ke Halaman 10



BIAR KUAT: Proses peninggian tanggul penahan Lumpur Lapindo di titik 10D, Kecamatan Porong, terus dikebut.

Peninggian Tanggul di Titik 10D Dikebut

■ Dekat Rel KA dan Jalan Raya Porong Lama

PROSES peninggian tanggul penahan Lumpur Lapindo di titik 10D, Kecamatan Porong, Sidoarjo, terus dikebut. Tanggul yang berada di dekat jalur transportasi vital Jawa Timur itu menjadi perhatian

Sidak Dinas Pendidikan, Wabup Tinjau Proses Rehabilitasi Aula Meeting

Sidoarjo, Memorandum

Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa bidang layanan di Kabupaten Sidoarjo, Senin (27/7). Sasaran sidak kali ini diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian serta Dinas Perizinan Sidoarjo.

Dinas Pendidikan menjadi tujuan pertama. Rombongan wabup tiba sekitar pukul 09.30. Setiba di lokasi, Wakil Bupati Mimik Idayana meninjau langsung semua ruang pelayanan di Dinas Pendidikan, termasuk fasilitas bus dinas pendidikan, yang mana keberuntukkannya meliputi bus pembelajaran luar kelas.

"Bus sekolah gratis ini disediakan pemerintah, jadi memanfaatkan bus gratis ini dengan baik," ujar Hj Mimik.

Tak hanya itu, Wabup Hj Mimik juga melihat ruang aula meeting yang tengah direhab.

"Kalau mutu pelayanan sudah bagus," pungkas Hj Mimik. (hum/jok/fdn)



Wabup Hj. Mimik Idayana sidak Dinas Pendidikan Sidoarjo.

● Ke Halaman 10



BIAR KUAT: Proses peninggian tanggul penahan Lumpur Lapindo di titik 10D, Kecamatan Porong, terus dikebut.

Peninggian Tanggul di Titik 10D Dikebut

■ Dekat Rel KA dan Jalan Raya Porong Lama

PROSES peninggian tanggul penahan Lumpur Lapindo di titik 10D, Kecamatan Porong, Sidoarjo, terus dikebut. Tanggul yang berada di dekat jalur transportasi vital Jawa Timur itu menjadi perhatian karena lokasinya berdekatan dengan rel kereta api dan Jalan Raya Porong Lama.

Pantauan di lokasi, Senin (27/7), sedikitnya empat unit alat berat jenis ekskavator berada di area tanggul. Dua unit terlihat aktif melakukan pekerjaan peninggian tanggul, sementara dua ekskavator lainnya disiagakan di sekitar lokasi.

Salah seorang pemandu wisata tanggul lumpur, Tofa (32), warga Desa Jatirejo, mengatakan pekerjaan peninggian tanggul telah berlangsung sejak awal Juni 2026 dan hingga kini masih terus dikerjakan.

● Ke Halaman 10

Peninggian Tanggul...

“Proses peninggian tanggul ini sudah dilakukan sejak awal Juni 2026. Sampai sekarang masih terus dikerjakan,” ujar Tofa.

Dari kejauhan, kondisi tanggul di titik 10D tampak membentuk cekungan. Menurut Tofa, kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh penurunan tanah yang masih terus terjadi di kawasan terdampak lumpur.

“Kalau dilihat memang bagian tanggul ini terlihat cekung. Informasinya setiap tahun tanggul mengalami penurunan sekitar 50 sentimeter,” katanya.

Tofa juga mengungkapkan, tanggul di titik 10D pernah mengalami kebocoran. Karena itu, menurutnya, peninggian dan perawatan tanggul harus terus dilakukan agar tidak

membahayakan infrastruktur penting yang berada di sekitarnya.

“Dulu tanggul ini pernah bocor. Kalau tidak segera ditangani, tentu bisa mengancam rel kereta api dan Jalan Raya Porong Lama karena posisinya sangat dekat,” jelasnya.

Sebelumnya, elevasi permukaan lumpur dan air di kawasan tersebut sempat mendekati bibir tanggul. Kondisi itu menjadi salah satu alasan dilakukannya peninggian tanggul sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keamanan kawasan.

Hingga berita ini ditulis, pihak Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) belum memberikan keterangan resmi terkait progres pekerjaan peninggian tanggul di titik 10D. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Warga Damarsi Tagih Kejelasan Kasus TKD

■ Datangi Kejari

KOTA-Perwakilan warga Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo untuk mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan alih fungsi Tanah Kas Desa (TKD) yang diduga berubah menjadi bangunan kos-kosan. Warga berharap proses hukum yang telah bergulir sejak awal tahun itu segera menunjukkan perkembangan yang jelas.

Salah satu perwakilan warga, Al Suuri (52), men-

gatakan kedatangan mereka bukan untuk memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum. Menurut warga hanya ingin menjalin komunikasi secara langsung mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan perkara tersebut.

"Kami mohon maaf jika datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tujuan kami bersilaturahmi dan memperkenalkan diri agar ke depan koordinasi antara aparat penegak hukum bisa berjalan lebih baik," ujar Al Suuri di Kejari Sidoarjo.

Selain itu, warga juga ingin memperoleh kepastian mengenai laporan yang telah mereka sampaikan sejak Januari lalu. Hingga kini, mereka mengaku masih menunggu perkembangan proses hukum kasus tersebut.

"Kami ingin meminta kejelasan terkait perkembangan pemeriksaan kasus Damarsi. Laporan sudah masuk sejak Januari, tetapi sampai sekarang warga masih menunggu kepastian dan kendian," katanya.

Al Suuri mengakui proses hukum membutuhkan

waktu dan harus melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, ia berharap penyidik terus mengoptimalkan pemeriksaan, termasuk memanggil pihak-pihak yang diperlukan untuk dimintai keterangan.

Menurutnya, belum adanya kepastian membuat masyarakat resah. Kendati demikian, pihaknya terus mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

● Ke Halaman 10



BUTUH PENJELASAN: Perwakilan warga Desa Damarsi mendatangi Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan alih fungsi Tanah Kas Desa (TKD).

Jalan Bluru Kidul Ditutup, Pendapatan Pedagang Turun

Minta Kompensasi ke Pemkab

SIDOARJO - Proyek betonisasi Jalan Bluru Kidul membawa dampak serius bagi para pedagang di sepanjang ruas jalan tersebut. Penutupan akses selama pengerjaan membuat pelanggan enggan datang, sehingga omzet usaha anjlok drastis. Bahkan, sejumlah pedagang memilih menutup usahanya sementara karena tidak lagi memperoleh pemasukan.

Salah satu pedagang nasi, Nuryati mengaku baru kembali membuka warungnya setelah dua pekan tutup. Namun harapannya untuk kembali memperoleh penghasilan belum terwujud. Pada hari pertama berjualan, ia hanya melayani sekitar 10 pembeli, jauh di bawah kondisi normal yang mampu mencapai 100 porsi per hari. "Saya buka setelah dua minggu tutup. Tapi, hanya dapat 10 pembeli," katanya.



BUTUH SOLUSI: Pelaku UMKM di Jalan Bluru Kidul mengeluhkan pendapatan yang turun setelah jalan ditutup untuk betonisasi.



“Perkiraan proyek rampung hingga Desember. Nggak mungkin warga saya puasa selama itu.”

Mohammad Fatkhur
Kepala Desa Bluru Kidul

Menurut Nuryati, akses menuju warungnya ditutup selama proyek berlangsung. Padahal, usaha tersebut menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga yang harus menghidupi suami dan dua anak. Selama tidak berjualan, ia terpaksa meng-

dalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pedagang bakso Kobar juga mengalami nasib serupa. Hingga kini ia masih belum berani membuka usahanya lantaran akses menuju lokasi masih sulit dilalui. Jalur alternatif yang tersedia

BETONISASI BLURU KIDUL

- Anggaran Rp 21,65 miliar
- Panjang jalan yang dibeton 1,5 kilometer
- Jalan dilebarkan jadi 11 meter
- Ada lebih dari 30 UMKM yang terdampak pembangunan

Sumber: Berbagai Informasi

hanya berupa gang-gang sempit sehingga pelanggan hampir tidak mungkin datang. “Kalau buka yang beli hanya pelanggan yang sudah tahu lokasi,” katanya.

Betonisasi sampai Desember

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DPUBMSDA Sidoarjo, Joko, menegaskan tidak ada skema kompensasi bagi pedagang yang terdampak proyek. Menurutnya, akses jalan kembali dibuka setiap sore setelah pekerjaan selesai dan penutupan telah disosialisasikan sejak awal kepada masyarakat.

Kepala Desa Bluru Kidul Mohammad Fatkhur mengaku telah mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada para pedagang. Namun hingga kini usulan tersebut belum mendapat persetujuan. “Perkiraan proyek rampung hingga Desember. Nggak mungkin warga saya puasa selama itu,” ungkap Fatkhur.

Saat ini, progres pengerjaan proyek baru mencapai sekitar 5,8 persen. Pekerjaan yang sedang dilakukan meliputi pemasangan saluran U-Ditch berukuran 60 x 80 sentimeter dan 100 x 100 sentimeter dengan target penyelesaian hingga Desember mendatang. Fatkhur menyebut proyek betonisasi dibutuhkan karena diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan warga. Namun, menurutnya, pemerintah juga perlu memberi perhatian terhadap keberlangsungan usaha para pedagang. (ful/hen)

Jawa Pos

✓ NU-Muhammadiyah Siap Turun Tangan Perangi Miras

Bupati Subandi Tebar Janji Lagi

SIDOARJO – Maraknya toko minuman keras (miras) di Sidoarjo juga mendapat atensi dari dua organisasi Islam besar. Yakni Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).

Ketua PCNU Sidoarjo Zainal Abidin mengatakan, secara sosial miras memberikan dampak buruk terhadap generasi muda. Karena itu harus dilakukan pencegahan. "Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk pemerintah, mungkin perlu juga melibatkan organisasi keagamaan hingga tingkat desa," katanya.

Sikap tegas juga disampaikan PDM Sidoarjo. Ketua PDM Sidoarjo Prof Dzoul Milal mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan jajaran Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting untuk memasang spanduk penolakan terhadap miras. "Yang jelas, kami tidak setuju dengan miras-miras itu," ujarnya.

Bupati Sidoarjo Subandi



ANGER BONDAN/JAWA POS

DESAK PENERTIBAN: Spanduk berisi penolakan penjualan miras ilegal masih terpasang di kawasan Sarirogo kemarin (27/7).

kembali melontarkan janji akan menutup toko maupun usaha penjualan miras yang tidak mengantongi izin. Keputusan itu diambil setelah rapat bersama Forkopimda, OPD, warga dan organisasi Islam kemarin (27/7). Dari pendataan sementara, terdapat 16 usaha penjualan miras yang tidak memiliki izin.

"Toko miras yang tidak ada perizinannya akan kita tutup. Operasi dalam waktu dekat," kata Subandi. Penertiban tidak berhenti pada 16 usaha tersebut. Pemkab akan menyisir seluruh wilayah ber-

sama kepolisian dan Satpol PP. Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa diperintah untuk mendata ulang lokasi yang menjual miras tanpa izin. Mereka diberi waktu selama satu minggu.

Subandi menargetkan proses penertiban itu rampung dalam waktu satu bulan. Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian di antaranya Krian, Jabon, dan Kota. Selain usaha tanpa izin, Pemkab juga akan menindak toko miras yang berada di sekitar sekolah maupun tempat ibadah. (ful/hen)

Jawa Pos

Tanggul Lumpur Lapindo Terus Ditinggikan

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Proses peninggian tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10.D di Kecamatan Porong, Sidoarjo, terus dilakukan. Tanggul yang berada di dekat jalur transportasi vital Jawa Timur itu menjadi perhatian karena lokasinya berdekatan dengan rel kereta api dan Jalan Raya Porong Lama.

Pantauan di lokasi, Senin, terlihat empat unit alat berat jenis ekskavator berada di area tanggul. Dua di antaranya tampak aktif melakukan pekerjaan peninggian tanggul, sementara dua unit lainnya berada di sekitar lokasi.

Salah seorang pemandu wisata tanggul lumpur, Tofa (32), warga Desa Jatirejo, mengatakan pekerjaan peninggian tanggul sudah berlangsung sejak awal Juni 2026. "Proses peninggian tanggul ini sudah dilakukan sejak awal Juni 2026. Sampai sekarang masih terus dikerjakan," kata Tofa kepada detikJatim di atas tanggul penahan Lumpur, Senin (27/7/2026).

Dari kejauhan, kondisi tanggul di titik 10 D tampak cekung. Kondisi tersebut diduga akibat penurunan tanah yang terus terjadi. "Kalau dilihat memang bagian tanggul ini terlihat cekung. Informasinya setiap tahun tanggul mengalami penurunan sekitar 50 sentimeter," ujarnya.

Tofa juga mengungkapkan, tanggul di titik 10D pernah mengalami kebocoran. Menurutnya, apabila peninggian dan perawatan tidak segera dilakukan, kondisi itu berpotensi membahayakan infrastruktur di sekitarnya. "Dulu tanggul ini pernah bocor. Kalau tidak segera ditangani, tentu bisa mengancam rel kereta api dan Jalan Raya Porong Lama karena posisinya sangat dekat," jelasnya.

Sebelumnya, elevasi permukaan lumpur dan air di kawasan tersebut juga sempat mendekati bibir tanggul sehingga diperlukan peninggian untuk menjaga keamanan tanggul. (md/rus)



Tanggul Lumpur Lapindo Titik 10.D di Porong Sidoarjo yang terus ditinggikan.

Kemenkes RI Buka Suara Soal Lonjakan Kasus HIV



ILUSTRASI: Pencegahan HIV di Sidoarjo.



Kemenkes RI...

dimaknai secara langsung sebagai meningkatnya penularan HIV. Sebaliknya, kondisi itu juga mencerminkan semakin efektifnya upaya deteksi dini yang dilakukan pemerintah bersama berbagai mitra.

Berdasarkan data situasi HIV di Kabupaten Sidoarjo, sejak 2001 hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 1.183 kasus HIV secara kumulatif pada kelompok usia 0-24 tahun.

Pada kelompok usia 0-10 tahun ditemukan 117 kasus yang seluruhnya merupakan penularan dari ibu ke anak (penularan vertikal). Dari jumlah tersebut, 32 anak masih menjalani terapi antiretroviral (ARV), 35 anak meninggal dunia, sedangkan 50 anak berstatus *lost to follow-up* (LFTU) atau

tidak lagi terpantau dalam layanan pengobatan.

Sementara itu, pada kelompok usia 11-17 tahun tercatat sebanyak 60 kasus HIV. Data tersebut menjadi pengingat pentingnya memperluas skrining HIV di berbagai layanan kesehatan sekaligus memperkuat pendampingan agar pasien tetap menjalani pengobatan secara berkelanjutan.

Menyikapi tingginya perhatian masyarakat terhadap kasus HIV pada anak dan remaja di Sidoarjo, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI telah melakukan supervisi program HIV di Kabupaten Sidoarjo.

Supervisi tersebut meliputi klarifikasi dan verifikasi data, termasuk kunjungan ke Delta Crisis Center (DCC) sebagai salah satu sumber

data yang menjadi rujukan dalam pemberian. Tim juga mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan, deteksi dini, pengobatan, pendampingan ODHIV, serta memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

Di sisi lain, Kemenkes terus memperkuat program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA). Selama periode 2022 hingga Juni 2026 tercatat 163 ibu hamil dengan HIV di Kabupaten Sidoarjo, terdiri atas 49 kasus pada 2022, 40 kasus pada 2023, 35 kasus pada 2024, 30 kasus pada 2025, dan 9 kasus hingga Juni 2026.

Seluruh ibu hamil didorong menjalani pemeriksaan HIV sebagai bagian dari pelayanan antenatal terpadu. Dengan pemberian terapi ARV sejak dini, risiko penularan HIV kepada

KOTA-Meningkatnya jumlah temuan kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Kabupaten Sidoarjo belakangan ini menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menegaskan bahwa kenaikan jumlah kasus yang ditemukan tidak serta-merta menunjukkan meningkatnya penularan HIV, melainkan merupakan dampak dari semakin luasnya layanan deteksi dini yang dilakukan pemerintah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, meminta masyarakat memahami data HIV secara utuh agar tidak memunculkan stigma maupun diskriminasi terhadap Orang dengan HIV (ODHIV).

"Data yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang ditemukan merupakan bagian dari keberhasilan perluasan layanan deteksi dini. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat mengetahui status HIV-nya dan dapat segera memperoleh pengobatan sesuai standar," ujar dr. Andi Saguni dalam keterangan resminya yang dikutip, Senin (27/7).

Ia menjelaskan, meningkatnya angka penemuan kasus dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin luasnya cakupan layanan tes HIV di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga layanan berbasis komunitas.

Karena itu, menurutnya, peningkatan angka tersebut tidak dapat

● Ke Halaman 10

bayi dapat ditekan hingga di bawah dua persen.

"HIV merupakan penyakit kronis yang dapat dikendalikan melalui terapi antiretroviral. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak takut melakukan tes HIV apabila memiliki faktor risiko atau direkomendasikan oleh tenaga kesehatan," tegas dr. Andi.

Ia menambahkan, mengetahui status HIV sejak dini merupakan langkah penting untuk melindungi diri sendiri, pasangan, maupun keluarga.

"HIV dapat dikendalikan dengan pengobatan yang diminum secara teratur sehingga orang dengan HIV dapat hidup sehat, produktif, dan tetap berkontribusi bagi masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, dr. Andi menegaskan bahwa keberhasilan program penang-

gulan HIV tidak hanya diukur dari menurunnya angka infeksi baru, tetapi juga dari semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui status HIV, segera memulai terapi ARV, dan mampu mempertahankan pengobatan secara berkelanjutan.

Kemenkes RI juga kembali mengingatkan masyarakat untuk menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV. Menurutnya, stigma tersebut justru menjadi salah satu penghambat utama bagi seseorang untuk melakukan tes maupun menjalani pengobatan.

"Dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas menjadi bagian penting dalam mencapai target 95-95-95 dan mewujudkan *Ending AIDS* pada tahun 2030," pungkasnya. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Targetkan Sebulan Tuntas Berantas Miras Illegal-Prostitusi

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo mengambil langkah tegas memberantas perdagangan minuman keras (miras) ilegal hingga praktik prostitusi. Bupati Sidoarjo Subandi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), DPRD, tokoh agama, serta organisasi masyarakat sepakat menggelar operasi terpadu dengan target penertiban tuntas dalam waktu satu bulan.

Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Opsroom Kantor Selda Sidoarjo. Hadir dalam rapat itu jajaran Forkopinda, pimpinan DPRD, PCNU, GP Ansor, Muhammadiyah, MUI, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga para camat.

Subandi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan memberikan toleransi terhadap pederasan minuman izin maupun

lokasi yang menjadi sarang penyakit masyarakat berupa prostitusi.

“Kami sepakat bergerak bersama Forkopinda. Warung maupun tempat usaha yang menjual miras tanpa izin akan kami tutup. Tempat-tempat yang menjadi lokasi penyakit masyarakat juga akan kami tertibkan. Target kami, dalam satu bulan penertiban ini bisa berjalan secara signifikan,” kata Subandi usai rapat, Senin (27/7/2026).

Ia menjelaskan, operasi penertiban akan melibatkan tim gabungan yang dipimpin Polresta Sidoarjo bersama Sapol PP, TNI, dan instansi terkait. Seluruh camat juga diinstruksikan turun langsung melakukan pengawasan di wilayah masing-masing. Tak hanya menasar warung penjual miras ilegal, operasi juga akan dilakukan di tempat hiburan malam, lokasi remang-re-



Rapat koordinasi pemberantasan miras ilegal dan prostitusi di Ruang Opsroom Kantor Selda Sidoarjo.

man, hingga kos-kosan yang disalahgunakan untuk aktivitas melanggar aturan. “Ini bukan

setelah razia selesai,” tegasnya.

Subandi mengungkapkan saat ini ada sedikitnya 16 tempat usaha yang diduga belum mengantongi izin resmi. Seluruhnya akan diverifikasi bersama camat, Kapolsek, kepala desa, dan unsur masyarakat sebelum dilakukan penertiban.

Selain itu, pemerintah juga akan menindak tempat usaha yang memiliki izin apabila lokasinya melanggar ketentuan, seperti berada di dekat sekolah, tempat ibadah, pandi asuhan, maupun fasilitas umum lainnya. “Izin melalui OSS bukan berarti otomatis bisa beroperasi. Tetap harus sesuai dengan Perda dan ketentuan tata ruang. Kalau melanggar aturan, tentu akan kami evaluasi dan kami tinda-

kan,” ujar Subandi.

Pemkab Sidoarjo juga berencana mervisi Perda terkait pederasan minuman beralkohol untuk memperkuat dasar hukum penertiban terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Operasi gabungan nantinya difokuskan di sejumlah wilayah yang selama ini dilaporkan rawan pederasan miras ilegal, di antaranya Tambak Jambur, Jambon, Pasar Larangan, serta lokasi lain yang menjadi perhatian aparat.

Menurut Subandi, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif sekaligus melindungi generasi muda dari dampak negatif pederasan miras dan penyakit masyarakat. “Kami ingin Sidoarjo lebih aman, tertib, dan generasi mudanya terlindungi. Karena itu seluruh elemen harus bergerak bersama, bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat,” pungkasnya. (md/rus)

Subandi Tutup Perseka Muda Cup XX Piala Bupati

WARU-Turnamen Sepak Bola Perseka Muda Cup XX Piala Bupati Sidoarjo 2026 resmi berakhir. Partai final yang berlangsung di Lapangan Perseka Muda, Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Minggu (26/7) sore, berlangsung meriah dan dipadati penonton.

Penutupan turnamen yang telah bergulir selama sebulan itu menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pembinaan sepak bola sekaligus mencetak bibit-bibit atlet berbakat.

Bupati Sidoarjo Subandi hadir langsung menutup turnamen yang telah menjadi agenda tahunan tersebut. Menurutnya, kompetisi sepak bola di tingkat daerah memiliki banyak manfaat, mulai dari mempererat kebersamaan masyarakat hingga menjadi wadah pembinaan atlet.

"Turnamen seperti ini memiliki banyak nilai positif. Selain mempererat kebersamaan masyarakat, juga menjadi motivasi bagi para pemain untuk terus



MERIAH: Bupati Sidoarjo Subandi menyerahkan trofi dan hadiah kepada Jakun FC dari Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, usai menjadi Juara Perseka Muda Cup XX Piala Bupati Sidoarjo 2026.

meningkatkan prestasi," ujar Subandi.

Ia menilai kompetisi sepak bola selalu mendapat antusiasme tinggi dari ma-

syarakat. Karena itu, penyelenggaraan turnamen seperti Perseka Muda Cup diharapkan terus digelar secara berkelanjutan di

berbagai wilayah Sidoarjo.

Menurutnya, semakin banyak kompetisi yang digelar, semakin besar pula peluang lahirnya

pemain-pemain muda berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah di level yang lebih tinggi. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Dorong Regulasi Baru, Penindakan Miras Ilegal dan Prostitusi Diminta Lebih Tegas



SIDOARJO | MEDIASOROTMATA.COM – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam memberantas peredaran minuman keras (miras) tanpa izin serta praktik prostitusi mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Sidoarjo. Selain meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas, DPRD juga mendorong pembaruan regulasi yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan. Sikap tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang membahas persoalan miras, prostitusi, dan penanganan HIV/AIDS di Opsroom Pemkab Sidoarjo, Senin (27/7/2026). Rapat yang berlangsung dipimpin oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing serta dihadiri Ketua DPRD Abdilllah Nasih, pimpinan DPRD, para ketua komisi, tokoh agama, dan sejumlah kepala perangkat daerah. Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdilllah Nasih menilai penegakan aturan harus menjadi fondasi utama dalam menekan berbagai bentuk penyakit masyarakat. “Yang pertama adalah penegakan peraturan atas semua pelanggaran yang ada, baik terkait miras, prostitusi, maupun yang lain. Penegakan aturan harus menjadi prioritas,” katanya. Menurut Abdilllah, Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang masih mengacu pada regulasi tahun 2013 sudah tidak lagi mampu menjawab dinamika yang terjadi saat ini. Karena itu, DPRD mendorong dilakukan revisi secara menyeluruh. Ia juga membuka peluang pembentukan Perda khusus yang mengatur peredaran minuman keras dan praktik prostitusi agar pengawasan maupun penindakan memiliki dasar hukum yang lebih spesifik. “Kita akan kaji bersama. Kalau memang dibutuhkan Perda tersendiri yang mengatur miras dan prostitusi, tentu akan kita upayakan,” ujarnya. Selain itu, keberadaan rumah kos turut menjadi perhatian DPRD. Menurut Abdilllah, pengawasan terhadap rumah kos perlu diperkuat agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat yang berpotensi memunculkan praktik prostitusi maupun pelanggaran lainnya. “Kita membutuhkan kebijakan yang bisa mengatur kos-kosan agar benar-benar tertib, aman untuk keluarga, dan tidak disalahgunakan,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin meminta Satpol PP segera menindak toko-toko yang menjual miras tanpa izin edar resmi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ia menjelaskan, hasil pembahasan dalam rapat menunjukkan tidak ada satu pun toko yang mengklaim memiliki izin ternyata mengantongi izin edar dari Disperindag Kabupaten Sidoarjo “Sudah jelas bahwa toko-toko miras yang mengklaim memiliki izin ternyata dari dokumen yang ada tidak satu pun memperoleh izin edar dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Disperindag,” tegasnya. Rizza menambahkan, penjual minuman beralkohol wajib memenuhi persyaratan perizinan, baik sebagai distributor maupun izin edar. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, Satpol PP diminta segera melakukan penegakan Perda. Ia juga mengingatkan agar aparat tidak menunda tindakan. Menurutnya, penegakan hukum harus dijalankan oleh pemerintah sehingga masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan tidak terdorong mengambil langkah sendiri. “Jangan sampai masyarakat atau ormas yang bergerak sendiri. Penegakan hukum adalah kewenangan pemerintah dan aparat penegak Perda,” pungkasnya. (Tim/GISO)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jangan Tunggu Hati Rusak! Dinkes Sidoarjo Bidik Kelompok Berisiko, Perang Terbuka Lawan Hepatitis



KaMedia – Hepatitis masih menjadi ancaman senyap yang kerap terlambat disadari. Penyakit ini sering tidak menunjukkan gejala hingga fungsi hati rusak parah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan memilih mengambil langkah yang lebih agresif: memburu kelompok berisiko sebelum virus lebih dulu menghancurkan korbannya. Memperingati Hari Hepatitis Sedunia, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memperkuat upaya pencegahan Hepatitis B dan Hepatitis C dengan strategi pemetaan kelompok berisiko sebagai dasar intervensi yang lebih tepat sasaran. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, M.Kes., menegaskan bahwa hepatitis tidak boleh lagi dianggap penyakit yang bisa ditangani setelah muncul gejala. “Musuh terbesar hepatitis adalah keterlambatan. Banyak penderita baru mengetahui dirinya terinfeksi ketika hati sudah mengalami kerusakan. Karena itu, deteksi dini harus dimulai dengan mengetahui siapa dan di mana kelompok yang paling rentan,” tegasnya. Saat ini Dinkes Sidoarjo sedang memetakan kelompok berisiko di seluruh kecamatan. Sasaran utama meliputi ibu hamil melalui skrining HBsAg saat pelayanan antenatal, pengguna jarum suntik tidak steril, kelompok dengan perilaku seksual berisiko, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penerima transfusi darah, hingga pasien hemodialisa. Menurut dr Lakhsmie, pemetaan bukan sekadar pendataan di atas kertas, melainkan senjata utama untuk memperluas skrining, mempercepat rujukan, dan memastikan edukasi diberikan tepat kepada kelompok yang paling membutuhkan. “Kalau kita hanya menunggu pasien datang dengan kondisi hati yang sudah rusak, kita selalu kalah. Karena itu, kami bergerak lebih dulu melalui pemetaan risiko,” ujarnya. Program Triple Eliminasi tetap menjadi ujung tombak, terutama memutus penularan Hepatitis B dari ibu kepada bayi. Seluruh ibu hamil diwajibkan menjalani pemeriksaan HBsAg. Bila hasilnya reaktif, bayi harus mendapatkan vaksin HB-0 dan imunoglobulin Hepatitis B (HBIG) kurang dari 24 jam setelah lahir. Skrining Hepatitis B dan Hepatitis C juga terus diperluas pada kelompok berisiko. Setiap kasus yang ditemukan akan langsung dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan dan penanganan sesuai standar. Hasilnya mulai terlihat. Proporsi ibu hamil positif Hepatitis B turun dari 2,47 persen pada 2019 menjadi 1,48 persen pada 2025. Bahkan pada tahun 2025, seluruh bayi yang lahir dari ibu dengan HBsAg positif telah menerima vaksin HB-0 dan HBIG sesuai standar. Sementara itu, skrining Hepatitis C pada kelompok berisiko selama semester pertama 2026 belum menemukan kasus baru. Momentum Hari Hepatitis Sedunia juga dimanfaatkan Dinkes Sidoarjo untuk mengingatkan masyarakat agar berhenti menganggap remeh hepatitis. “Jangan takut diperiksa. Yang berbahaya bukan tesnya, tetapi terlambat mengetahui. Dengan pemetaan yang lebih baik, kita bisa mencegah lebih cepat, menyelamatkan fungsi hati, dan memutus rantai penularan,” kata Lakhsmie. Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian, memastikan seluruh alat kesehatan dalam kondisi steril, menerapkan perilaku seksual yang aman, serta melengkapi imunisasi Hepatitis B sesuai jadwal. Pemkab Sidoarjo menegaskan, eliminasi hepatitis pada 2030 bukan sekadar slogan. Target itu hanya bisa tercapai jika pemerintah bergerak lebih cepat dan masyarakat berhenti menunda pemeriksaan. Sebab, hepatitis tidak menunggu—dan kerusakan hati sering kali sudah terlambat untuk diperbaiki ketika gejalanya akhirnya muncul.

